



PRESTASI

Mengembangkan Tradisi Berprestasi

* Akuntansi Lingkungan, Menuju Pembangunan Perusahaan Yang Berkelanjutan

* Pemberdayaan UMKM Menggunakan Profil Usaha UMKM Sukses Dan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM Melalui Penjaminan Kredit

* Pengaruh Pajak Penghasilan Menurut WP- Pajak Dan Menurut Pemeriksa Terhadap Penerimaan PPH

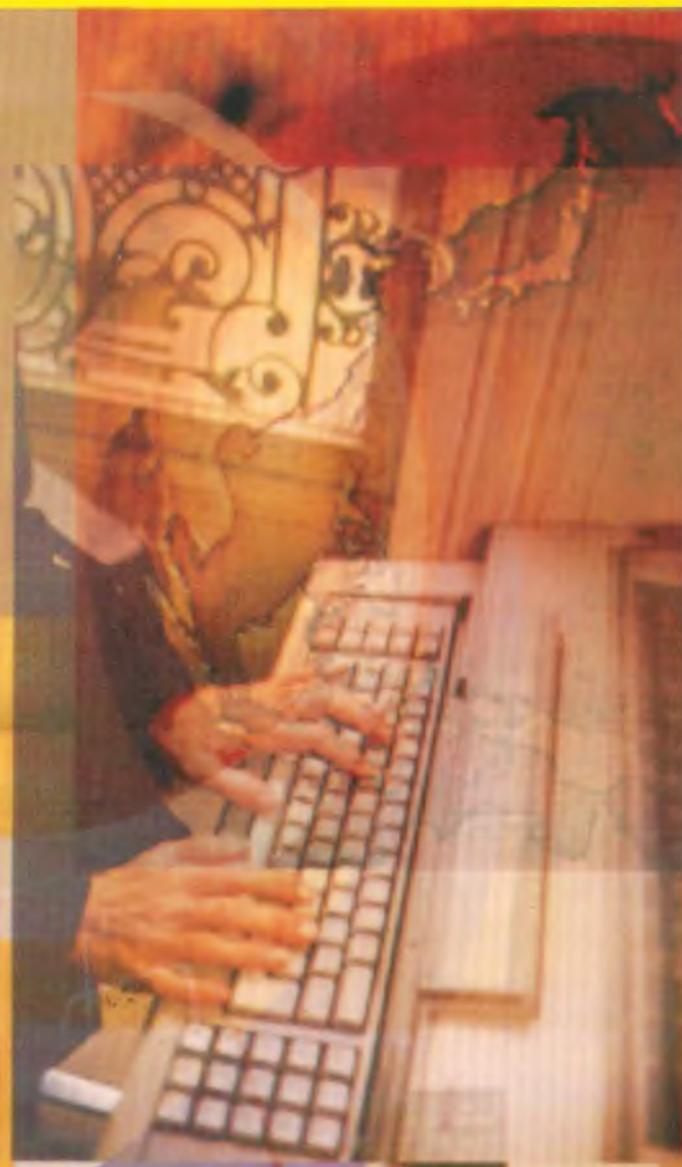
* Profitabilitas Perusahaan Dan Opini Audit : Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Auditor

* Tanggung Jawab Moral Produsen Terhadap Konsumen Dan Lingkungan

* Pengungkapan Dalam Pelaporan Keuangan Bagi Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI

* Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Pasca Otonomi Daerah

* Dinamika Anggaran Audit Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Audit



Penasehat:

Ketua Yayasan STIE Bank BPD Jateng

Pelindung:

Ketua STIE Bank BPD Jateng

Pemimpin Umum:

Drs. Koentjoro Waloejono, MM

Pemimpin Redaksi:

Muliawan Hamdani, SE

Sekretaris Redaksi:

Drs. Hery Prasetya

Kuangan:

Sri Imaningati, SE, Akt

Koord. Liputan:

Ali Mursid, SS, MM

Layout / Desain:

Drs. Hery Prasetya

Promosi, Sirkulasi & Iklan:

Suhana, SS

Alamat Redaksi:

STIE Bank BPD Jateng
Jl. Pemuda No. 4A Semarang
Telp. (024) 3553834, Fax. 3560130
Email: Prestasi@stiebankbpdjateng.ac.id

Para pembaca yang budiman,

Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga penerbitan majalah ini dapat terlaksana. Disaat menjelang tahun baru kita telah mempersiapkan berbagai macam acara untuk menyambut kedatangan pergantian tahun tersebut. Spirit baru untuk menjadi lebih baik tentulah yang kita utamakan. Dimana kita ingin bangsa kita semakin maju dan mengubah perilaku menjadi yang lebih baik.

Selaku perwakilan redaksi kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penerbitan majalah ini. Tak ada gading yang tak retak, tentu kami mohon kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan majalah ini semakin baik. Harapan kami semoga para terbitan ini dapat menjadikan manfaat bagi para pembaca.

Salam hangat selamat dan sukses serta selamat membaca dalam edisi kali ini.

Redaksi

DAFTAR ISI

	Hal.
1. Akuntansi Lingkungan, Menuju Pembangunan Perusahaan Yang Berkelanjutan	
<i>Oleh: Grace Tiana Solovida</i>	1 - 11
2. Pemberdayaan UMKM Menggunakan Profil Usaha UMKM Sukses Dan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm Melalui Penjaminan Kredit	
<i>Oleh: Muhammad Yusuf</i>	12 - 20
3. Pengaruh Pajak Penghasilan Menurut WP-Pajak Dan Menurut Pemeriksa Terhadap Penerimaan PPH	
<i>Oleh: Yohana Kus Suparwati</i>	21 - 34
4. Profitabilitas Perusahaan Dan Opini Audit: Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Auditor	
<i>Oleh: Nur Anissa</i>	35 - 37
5. Tanggung Jawab Moral Produsen Terhadap Konsumen Dan Lingkungan	
<i>Oleh: Muliawan Hamdani</i>	38 - 45
6. Pengungkapan Dalam Pelaporan Keuangan Bagi Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI	
<i>Oleh: Mekani Vestari</i>	46 - 56
7. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Pasca Otonomi Daerah	
<i>Oleh: Sri Imaningati</i>	57 - 62
8. Dinamika Anggaran Audit Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Audit	
<i>Oleh: Winarsih</i>	63 - 72

PEMBERDAYAAN UMKM MENGGUNAKAN PROFIL USAHA UMKM SUKSES DAN OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PENJAMINAN KREDIT

Oleh:

Muhammad Yusuf
STIE Bank BPD Jateng

Pendahuluan

Pemberlakuan GATT/WTO telah menimbulkan berbagai kerugian terhadap ekonomi makro di banyak negara berkembang. GATT/WTO dapat menimbulkan dampak negatif bagi sektor industri manufaktur terutama pada industri yang tidak efisien atau tidak memiliki daya saing yang tinggi. Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian dari sektor industri yang menerima dampak negatif langsung. Hal ini karena umumnya UMKM di Indonesia masih mengalami berbagai kendala, seperti rendahnya kualitas SDM, keterbatasan teknologi, dan modal investasi.

Secara umum sektor UMKM memiliki karakteristik seperti: a) sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar; b) margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi; c) modal terbatas; d) pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih terbatas; e) skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan penekanan biaya untuk mencapai efisiensi jangka panjang; f) kemampuan pemasaran dan negosiasi terbatas; g) kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah karena keterbatasan sistem administrasi.

Karakteristik yang dimiliki oleh UMKM mengisyaratkan adanya kelemahan-kelemahan yang potensial menimbulkan masalah. Hal ini telah menyebabkan berbagai masalah internal, terutama berkaitan dengan pendanaan, walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kemudahan dengan paket-paket kebijakan untuk mendorong sektor usaha kecil tersebut. Di samping itu, UMKM menghadapi pula faktor-faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan daya saing dan kinerja, yaitu: a) lemahnya sistem pembiayaan dan kurangnya komitmen pemerintah bersama lembaga legislatif terhadap dukungan permodalan UMKM, sehingga keberpihakan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan masih belum seperti yang diharapkan; b) kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses pasar; c) terbatasnya informasi sumber bahan baku dan panjang jaringan distribusi; d) belum terciptanya *blue print* platform teknologi dan informasi, yang meliputi masalah regulasi, pembiayaan, standarisasi, lisensi jenis teknologi tepat; e) proses perizinan pendirian badan usaha, paten, merek, hak cipta, investasi, izin yang masih birokratis, biaya tinggi, dan waktu yang lama.

Sampai dengan akhir tahun 2006 BPS menginformasikan bahwa jumlah UKM yang ada di Indonesia sudah mencapai 48,258 juta, atau 99,99% dari unit usaha yang ada. Kelompok usaha ini mampu menyerap tenaga kerja lebih kurang 96,3% dari jumlah tenaga kerja produktif yang tersedia. Sedangkan sumbangannya terhadap PDB mencapai 53,4%. Data tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Atas dasar potensi dan karakteristik tersebut, maka pemberdayaan usaha UMKM dinilai masih strategis dan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Peran strategis tersebut antara lain: a) jumlah yang sangat banyak dari usaha kecil berpotensi menciptakan lapangan kerja yang luas, b) kontribusi usaha kecil terhadap PDB 53,4%, dan c) usaha kecil merupakan pelaku utama yang berinteraksi dengan konsumen akhir. Karena itu, pemberdayaan dan

pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan terhadapnya agar UMKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah tetapi juga berkembang dalam kualitas dan daya saing produknya.

Profil UMKM Sukses

Pemberdayaan UMKM nampaknya masih bergelut pada masalah klasik seperti antara lain rendahnya produktivitas, kesulitan akses terhadap sumberdaya produktif. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pioner-pioner yang dapat menjadi stimulator pembangunan dalam kelompok tersebut. Salah satu unsur yang diharapkan dapat mendorong pembangunan usaha baru dari kalangan masyarakat sendiri adalah UMKM sukses. Kelompok ini memang jumlahnya relatif sangat sedikit tetapi kemampuannya baik dalam memanfaatkan sumberdaya lokal maupun dalam menemukan potensi-potensi baru yang dapat dikembangkan menjadi usaha produktif sangat dapat diandalkan.

UMKM sukses adalah kelompok UMKM yang mampu memanfaatkan sumberdaya tersedia terutama yang bernilai ekonomi rendah termasuk limbah menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi. Berbagai produk UMKM sukses telah membuktikan bahwa kelompok UMKM ini telah mampu melakukan kegiatan usaha yang memiliki nilai tambah cukup besar seperti pengrajin bonggol kayu yang menghasilkan meja dan kursi dengan nilai tambah mencapai lebih dari 600%, atau pengrajin eceng gondok yang bukan saja mampu menjual produknya dengan harga yang mencapai lebih dari 500% dibandingkan dengan harga bahan baku yang digunakannya tetapi juga telah mengurangi pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi *externality economics* yang sebelumnya harus ditanggung oleh masyarakat.

Keberhasilan UMKM sukses ternyata tidak hanya karena keahlian yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: a) Jiwa kewirausahaan dan kreatifitas individual yang melahirkan inovasi; b) ketersediaan bahan baku, iklim usaha, dukungan finansial, ketersediaan informasi baik pengetahuan dan teknologi, ketersediaan pasar dan dukungan infrastruktur. Penumbuhan usaha yang diinspirasi dari adanya kreativitas dan inovasi merupakan model ideal dalam kerangka pembangunan yang bertujuan mengoptimalkan potensi sumberdaya tersedia dan bersifat partisipatif. Oleh sebab itu, pengungkapan kiat-kiat usaha dan penulisan inovasi usaha tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Profil UMKM sukses adalah gambaran morfologis dari UMKM yang bersangkutan dilihat dari aspek usaha dan sifat kewirausahaan dari pengusaha UMKM tersebut. Hal tersebut terlihat dari antara lain kemampuannya dalam menciptakan nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan serta kemampuannya memanfaatkan potensi sumberdaya lokal dan sumberdaya alam. Dengan memperhatikan profil UMKM sukses dan ketersediaan sumber daya lokal yang sedemikian besar, serta masalah pengangguran dan kemiskinan yang belum dapat terpecahkan, maka pengembangan UMKM sukses merupakan salah satu solusi yang perlu dikaji dalam rangka pemberdayaan kelompok miskin terutama di pedesaan. Pembukaan usaha baru dengan memanfaatkan inovasi yang telah dibangun oleh kelompok UMKM sukses perlu dikembangkan dengan dengan berbagai cara seperti melakukan replikasi, kerja sama kemitraan dan bentuk-bentuk lainnya. Sebagai langkah awal dari usaha pengembangan ini diperlukan adanya suatu kajian yang komprehensif untuk dapat menginventarisir, mengidentifikasi dan merumuskan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kelompok UMKM untuk dijadikan bahan masukan dalam rangka penyusunan model penumbuhan usaha baru yang berbasis kreatifitas dan inovasi kelompok UMKM sendiri.

Profil UMKM sukses diartikan sebagai gambaran morfologis UMKM yang bersangkutan dilihat dari aspek:

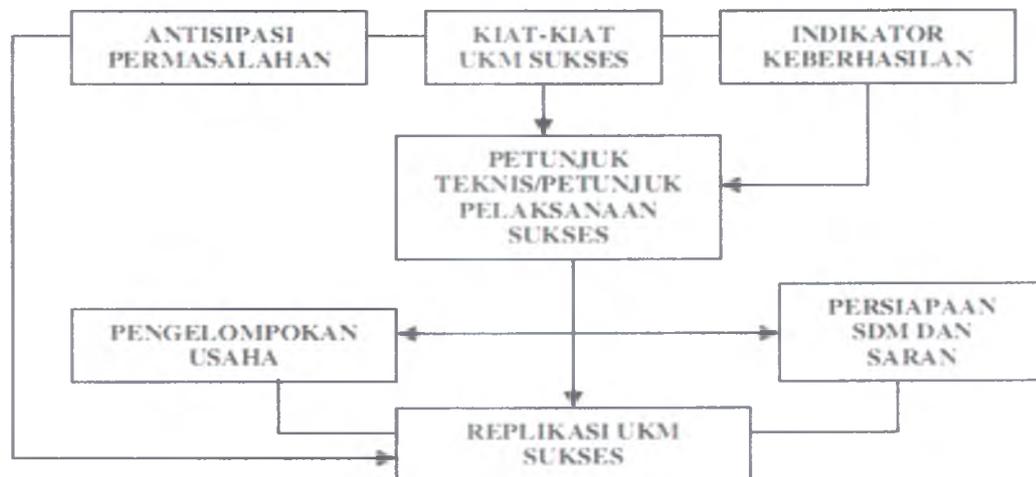
- 1) Kewirausahaan yang diindikasikan dari a) Kreatifitasnya yang melahirkan inovasi sehingga mampu menciptakan nilai tambah; b) Kemampuannya untuk melihat peluang usaha dan memanfaatkan peluang tersebut menjadi kesempatan kerja; c) Keberaniannya menanggung resiko kerugian dari usaha yang dilaksanakan; d) Kemampuan manajerial yang menghasilkan efisiensi sumberdaya yang relatif tinggi, dan; e) Penguasaan pengetahuan tentang bisnis yang ditekuni secara mendalam.
- 2) Keberhasilan usaha yang diindikasikan dari; a) Peningkatan nilai tambah atas bahan baku yang digunakan; b) efisiensi penggunaan modal dan; c) laba yang diperoleh.
- 3) Dari aspek pembangunan wilayah, profil UKM sukses dapat diindikasikan dari a) kemampuannya memanfaatkan limbah atau barang-barang yang mengganggu lingkungan menjadi barang yang bermanfaat atau bernilai ekonomi; b) Kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja dan; c) kemampuannya dalam memberikan sumbangan terhadap Product Domestik Bruto (PDB).

Replikasi UMKM Sukses

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun *best practice* UMKM sukses yaitu sebagai berikut:

- 1) Membakukan kiat kiat keberhasilan UKM melalui diskusi dengan kelompok UKM sukses dan pakar.
- 2) Mengelompokan usaha jenis usaha serta pengkajian tingkat keberhasilan usaha dan dampak keberhasilan tersebut terhadap lingkungannya.
- 3) Menyusun konsep kebijakan replikasi dalam bentuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan replikasi.
- 4) Mempersiapkan SDM, parasma dan sarana yang diperlukan termasuk pendidikan, pelatihan dan pendampingan.
- 5) Mempersiapkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UKM sukses dari semua aspek usahanya.

Secara skematis konsepsi replikasi UMKM sukses dapat digambarkan sebagai berikut ini.



Sumber: Rr. Gunari Budiretnowati, 2007

Pemberdayaan UMKM Melalui Kerjasama Pemda, Lembaga Penjaminan Kredit Dan Perbankan

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh UKM khususnya yang tergolong dalam UMKM adalah terbatasnya kualitas sumber daya yang dimiliki, akses pasar dan permodalan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah yang antara lain adalah dengan

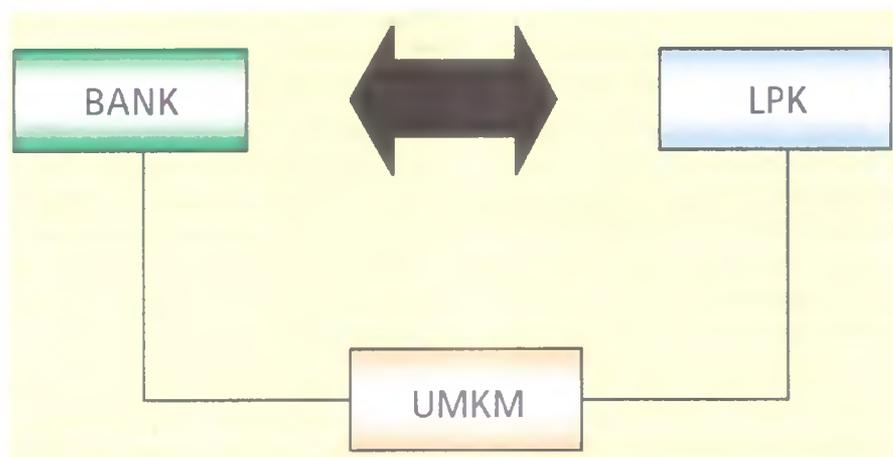
melakukan pembinaan melalui Dinas Teknis, membentuk tim pendamping UMKM atau BDS, melembagakan KKMB, meminta komitmen bank dalam pembiayaan UMKM dalam Bussiness Plan-nya dan juga menyediakan dana bergulir yang bersumber dari APBD atau bagian laba BUMN/D yang disisihkan.

Berkaitan dengan masalah permodalan, upaya pemerintah dengan menyediakan dana bergulir baru menjangkau sebagian kecil usaha yang ada. Sementara itu, banyak UMKM yang kesulitan memperoleh tambahan modal walaupun mempunyai prospek usaha yang bagus (*feasible*) akan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank (tidak *bankable*). Untuk menjawab permasalahan tersebut, salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah mengoptimalkan peran lembaga penjaminan sebagai penjamin kredit yang diajukan oleh UMKM sehingga UMKM tetap dapat menikmati kredit perbankan walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan.

Lembaga Penjamin Kredit (LPK)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.486/KMK.017/96 tanggal 30 Juli 1996 tentang perusahaan penjaminan, di Indonesia telah berdiri beberapa perusahaan penjaminan yang antara lain adalah PT. ASKRINDO, Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT. PKPI. Khusus mengenai Lembaga Penjamin Kredit Daerah, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Negara Urusan Koperasi & UKM dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No.04/KEP/M/V/2001 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan bagi Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Non Bank dan UKM di daerah.

Upaya meningkatkan akses kredit UKM ke perbankan melalui penjaminan kredit juga menjadi perhatian Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam salah satu dari 19 rekomendasi kebijakan perbankan yang harus ditempuh dalam kerangka cetak biru mengenai tatanan industri perbankan ke depan atau yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan akses kredit perbankan ke sektor riil adalah dengan memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit.



Model kerjasama antara Bank dengan LPK secara umum telah dilakukan antara perusahaan asuransi kredit baik untuk kredit yang bersifat individual maupun portofolio dengan perbankan. Dengan model penjaminan ini, maka terjadi pengalihan/pembagian resiko kredit (*default risk*) antara Bank dengan LPK. Dengan model ini, seharusnya Bank tidak menambahkan premium risk dalam perhitungan tingkat suku bunga yang diberikan kepada UMKM.

Praktek Penjaminan Kredit Di Beberapa Negara Tetangga

Kegiatan penjaminan kredit telah secara luas dilakukan oleh berbagai negara. Di kawasan ASEAN sendiri, negara seperti Malaysia telah melakukan praktek penjaminan kredit sejak tahun 1972. Beberapa praktek penjaminan yang dilakukan oleh negara tetangga antara lain adalah sebagai berikut :

1. *Thailand*

Small Industry Credit Guarantee Corporation (SICGC) adalah LPK di Thailand yang beroperasi sejak 21 Februari 1992, dengan tujuan utama memberikan jaminan kredit kepada kredit yang mengalami kekurangan collateral. Lembaga ini merupakan lembaga non profit dengan mayoritas kepemilikan oleh pemerintah (93,18%) disamping asosiasi bank swasta, bank milik pemerintah, dan lain-lain.

2. *Filipina*

The Small Business Guarantee and Finance Corporation (SB Corporation) didirikan tahun 1991 namun beroperasi sebagai lembaga penjaminan kredit untuk usaha kecil sejak tahun 2001 dengan kepemilikan terdiri dari 43% oleh pemerintah pusat dan 57% oleh 5 lembaga keuangan milik pemerintah.

3. *Malaysia*

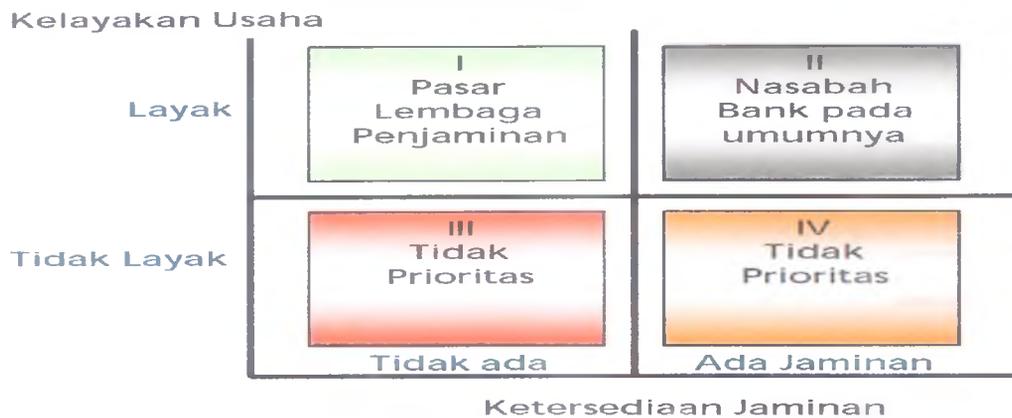
The Credit Guarantee Corporation Bhd (CGC) didirikan pada tahun 1972 dengan kepemilikan terdiri dari Bank Negara Malaysia dan Commercial Bank & Financial Companies.

Optimalisasi Peran Pemda Dalam Pengembangan UMKM Melalui Penjaminan Kredit

Berkaitan dengan peningkatan akses UMKM kepada Perbankan, PEMDA harus mengupayakan peningkatan kualitas pendamping UMKM dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pendamping UMKM baik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun pendamping UMKM yang merupakan lembaga swasta (BDS). Akan tetapi, jasa pendampingan yang dilakukan hanya dapat menghasilkan output yang optimal apabila sektor UMKM yang didampingi adalah UMKM yang mempunyai kriteria feasible dan mempunyai potensi *bankable*. Terhadap UMKM yang mempunyai kriteria dimaksud, pendamping UMKM dapat melakukan perbaikan pengelolaan usaha baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun aspek legal dari usaha yang dijalankan (termasuk didalamnya sertifikasi tanah yang dimiliki yang dapat dipergunakan sebagai jaminan tambahan dan sebagainya).

Akan tetapi, berdasarkan hasil dialog yang dilakukan dan informasi yang disampaikan oleh Dinas Teknis pembina UMKM, banyak UMKM yang pada dasarnya feasible namun tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan kredit perbankan (tidak *bankable*), yang salah satunya adalah karena tidak mempunyai jaminan tambahan yang dipersyaratkan perbankan. Menghadapi kondisi tersebut, salah satu solusi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan mengupayakan penjaminan kredit melalui kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) maupun dengan membentuk Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD).

Secara lebih jelas, pasar bagi lembaga penjaminan kredit dapat digambarkan pada diagram dibawah. Pada diagram dibawah, kuadran I menunjukkan pasar lembaga penjaminan kredit yaitu UMKM atau Koperasi yang memiliki usaha yang layak untuk dibiayai (feasible) akan tetapi tidak memiliki agunan yang cukup (kuadran I), sementara kuadran ke II merupakan pasar bagi perbankan pada umumnya yaitu UMKM yang usahanya layak untuk dibiayai dan memiliki jaminan tambahan.



Skema Penjaminan Kredit Dengan Mengoptimalkan Peran Pemerintah Daerah (Pemda)

Beberapa alternatif yang dapat diterapkan dalam melakukan penjaminan kredit UMKM melalui optimalisasi peran PEMDA adalah sebagai berikut :

Model Kerjasama PEMDA dengan Lembaga Penjamin Kredit

Model kerjasama LPK dengan PEMDA merupakan upaya mendorong pertumbuhan UMKM dan kredit perbankan dengan melibatkan PEMDA dalam penyediaan dana penjaminan. Sumber dana penjaminan bisa berasal dari APBD yang disisihkan dan diperuntukkan bagi pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Dengan skema/model ini, UMKM yang dilibatkan adalah UMKM yang merupakan binaan dari dinas teknis. PEMDA menyediakan dana yang dimasukkan dalam rekening LPK dan oleh LPK dana dimaksud akan digunakan untuk menjamin kredit yang diajukan kepada Bank oleh UMKM yang telah mendapat persetujuan dari PEMDA.

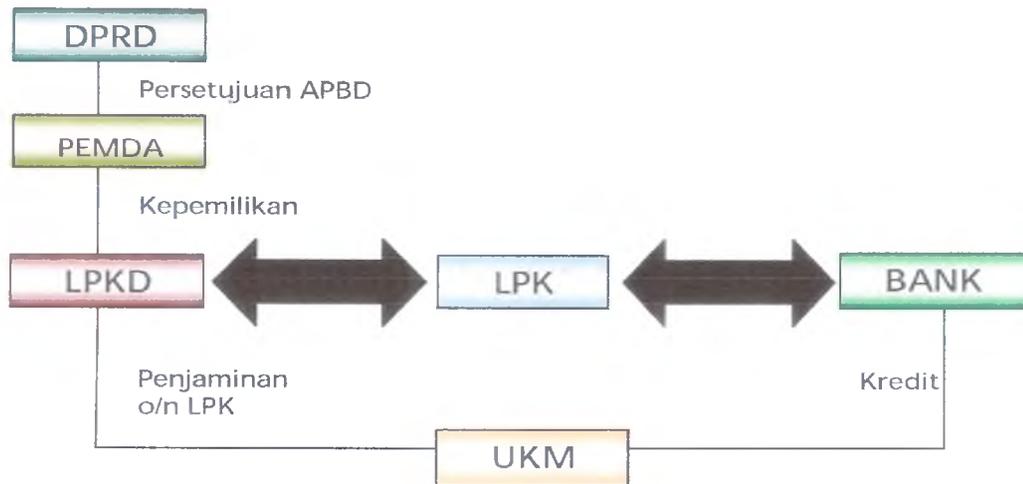


Dengan model ini, maka ada pembagian resiko antara PEMDA, LPK dan Bank sesuai bagian resiko yang telah disepakati bersama. Dana PEMDA yang ditempatkan dalam rekening LPK akan digunakan untuk membiayai fee penjaminan, sedangkan bunga dari dana PEMDA yang belum digunakan akan menjadi sumber pendapatan lain bagi LPK dalam membiayai operasionalnya.

Model Kerjasama LPK bentukan PEMDA dengan LPK

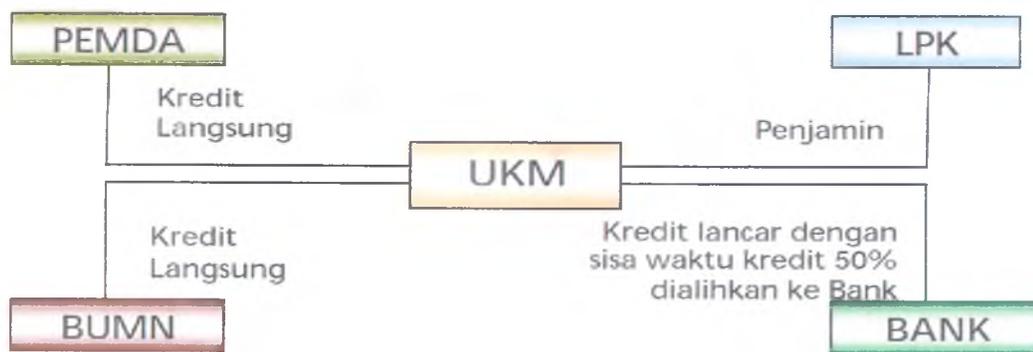
Dalam model ini, PEMDA atas persetujuan DPRD membentuk Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dengan dana yang berasal dari APBD. Selanjutnya, LPKD dapat bekerjasama dengan LPK dalam melakukan penjaminan atas kredit UMKM yang diajukan kepada perbankan. Dengan model ini, terjadi pembagian resiko antara PEMDA melalui LPKD,

LPK dan Bank. Sejalan dengan waktu, apabila LPKD sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam penjaminan kredit, maka LPKD dapat langsung melakukan kerjasama dengan Bank tanpa melalui LPK.



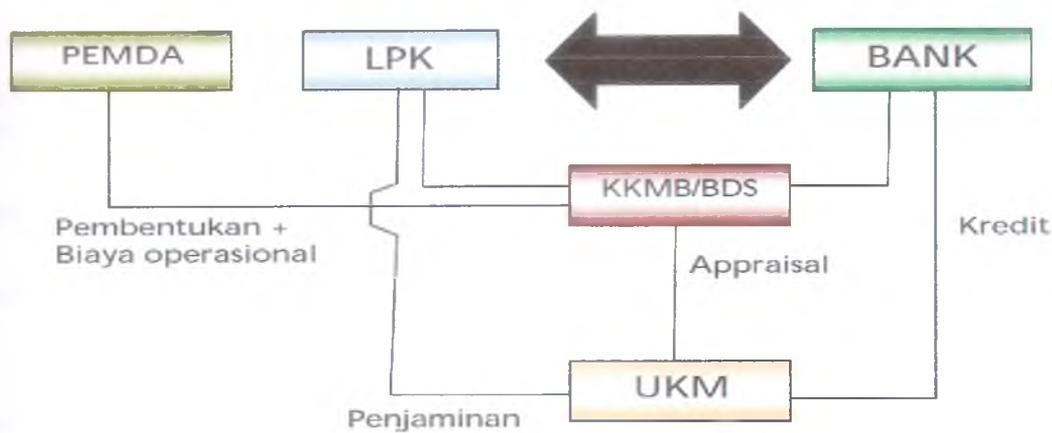
Model Pengalihan Kredit Non Bank untuk UMKM binaan PEMDA/BUMN kepada Bank dengan penjaminan dari Lembaga Penjamin Kredit (LPK)

Model ini bertujuan untuk meningkatkan perputaran dana bergulir PEMDA maupun laba BUMN/BUMD yang disisihkan untuk pembinaan UMKM. Usaha mikro kecil yang telah memperoleh kredit yang bersumber dari dana bergulir dan mampu mengembalikan pinjamannya dengan lancar hingga 50% dapat dialihkan ke kredit bank yang sekaligus dijamin oleh LPK. Dengan pengalihan kredit ini maka perputaran dana bergulir yang ada akan semakin cepat sehingga pemberian dana bergulir pada UMKM atau koperasi yang lain dapat dipercepat juga. Permasalahan yang sering dihadapi adalah pemahaman yang keliru mengenai pemberian bantuan dana bergulir yang sering diartikan sebagai "pemberian" sehingga UMKM/koperasi penerima dana bergulir kurang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana tersebut.



Model Kerjasama dengan Memanfaatkan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) oleh Lembaga Penjamin Kredit dan Bank

Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan *Business Development Services* (BDS) sesuai dengan tujuan pembentukannya bertujuan untuk menjembatani antara UMKM dengan bank. KKMB dan BDS juga berperan sebagai pendamping UMKM dalam penyusunan proposal kredit sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh bank sehingga secara tidak langsung memudahkan bank dalam menilai kelayakan suatu usaha. Peran ini dapat dimanfaatkan dalam suatu skema kerjasama yaitu KKMB/BDS berperan dalam melakukan appraisal atas UMKM yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh LPK dan bank.



Penutup

UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Pemberdayaan usaha UMKM merupakan langkah strategis dan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang berkelanjutan perlu dilakukan agar UMKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah tetapi juga berkembang dalam kualitas dan daya saing produknya. Untuk itu diperlukan adanya pioner-pioner yang dapat menjadi stimulator pembangunan dalam kelompok tersebut. UMKM sukses adalah kelompok UMKM yang mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia terutama yang bernilai ekonomi rendah termasuk limbah menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi. Untuk itu penciptaan replikasi-replikasi UMKM sukses merupakan salah satu solusi yang perlu disarankan dalam rangka menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Permasalahan umum yang seringkali dihadapi oleh UMKM adalah terbatasnya kualitas sumber daya yang dimiliki, akses pasar dan permodalan. Berkaitan dengan masalah permodalan, alternatif solusi yang dapat ditempuh adalah dengan mengoptimalkan peran lembaga penjaminan sebagai penjamin kredit yang diajukan oleh UMKM, sehingga UMKM tetap dapat menikmati kredit perbankan walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan. Beberapa alternatif yang dapat diterapkan dalam melakukan penjaminan kredit UMKM melalui optimalisasi peran PEMDA adalah: (1) Model Kerjasama PEMDA dengan LPK, (2) Model Kerjasama LPK bentukan PEMDA dengan LPK, (3) Model Pengalihan Kredit Non Bank untuk UMKM binaan PEMDA/BUMN kepada Bank dengan penjaminan dari LPK, (4) Model Kerjasama dengan Memanfaatkan Konsultan Keuangan Mitra Bank oleh LPK dan Bank.

Daftar Pustaka

- _____, (2007), *Laporan Hasil Kajian Tentang Profil UKM Sukses*, Kerjasama Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK dengan PT. Teknovasi Sejahtera Mandiri, Jakarta
- ACG Advisory, (2004), *Kajian Proyeksi Penumbuhan Unit Usaha Baru Periode Tahun 2005-2020*.
- Djoko Retnadi, *Peran Kredit UMKM 2007, Peluang Dan Tantangan*, Economic Review No. 207, Maret 2007.
- Rr. Gunari Budiretnowati, 2007, *Kajian Tentang Profil UKM Sukses*.
- Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005, *Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Untuk Pemberdayaan UKM*, Jurnal Pengkajian Koperasi Dan Ukm Nomor 2 Tahun I – 2006.
- Kresna Wijaya, 2002, *Kumpulan Pemikiran: Analisis Pemberdayaan Usaha Kecil*, Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.
- Noer Soetrisno, 2003, *Pengembangan UKM, Ekonomi Rakyat Dan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Tulus Tambunan, *Masalah Pengembangan UMKM di Indonesia: Sebuah Upaya Mencari Jalan Alternatif*, Bahan diskusi Forum Keadilan Ekonomi (FKE) Institute for Global Justice, Jakarta, 28 September 2007.
- Wiloejo Wirjo Wijono, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisis Khusus, November 2005.
- Yunus Zain, et.all, 2006, *Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan Di Sulawesi Selatan*.